

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki peran penting dalam menetapkan prinsip, standar, serta tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif. Dalam peraturan tersebut, Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Pasal 1 ayat (1) mencakup seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. Peraturan ini menjadi dasar hukum yang mengatur proses penyusunan anggaran, pelaksanaan pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Salah satu bagian dari Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam ayat (1) adalah mengenai Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas.

Prosedur pengeluaran kas tidak dapat dipisahkan dari proses verifikasi dan pemeriksaan dokumen pembayaran yang menjadi tahap awal dalam memastikan keabsahan dan kelengkapan dokumen pendukung. Verifikasi yang dilakukan agar pengeluaran kas sesuai dengan anggaran dan aturan yang berlaku.

Dokumen pembayaran yang dilakukan verifikasi umumnya meliputi faktur, kuitansi, surat perintah pembayaran, serta dokumen pendukung lainnya. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dan disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memegang peran penting dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran dan aset daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel (Wijaya, 2020). Untuk menjaga transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, dua hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah proses verifikasi surat perintah membayar (SPM) dan rekonsiliasi aset daerah (Prasetyo, 2021). Menurut Wibowo (2020), Proses Verifikasi SPM bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prosedur verifikasi memiliki peranan penting dalam mendukung penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) oleh pemerintah. Masyarakat mengharapkan agar pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan adanya proses verifikasi yang tepat, risiko penyalahgunaan anggaran dapat dikurangi.

Di era digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, prosedur verifikasi mulai bertransformasi dengan penggunaan sistem informasi keuangan yang terintegrasi. Namun, prinsip utama dalam verifikasi tetap harus dijalankan dengan teliti agar sistem dapat berfungsi dengan baik dan data yang dihasilkan dapat dipercaya. Prosedur verifikasi dokumen pembayaran juga sangat penting dalam mendukung prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Dengan melakukan pemeriksaan yang teliti, penggunaan dana publik dapat dihindarkan dari pembayaran yang tidak tepat atau tidak sah. Hal ini memungkinkan sumber daya keuangan dialokasikan ke program-program yang lebih prioritas dan bermanfaat.

Penulis memahami prosedur verifikasi dokumen pembayaran menjadi bekal penting sebelum memasuki dunia kerja. Di lapangan, kemampuan untuk melakukan verifikasi dengan benar sangat dibutuhkan oleh petugas keuangan daerah agar pengelolaan keuangan dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mempelajari dan mengetahui tentang bagaimana Prosedur Verifikasi Dokumen

Pembayaran pada BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis akan membahas yaitu **“Prosedur Verifikasi Dokumen Pembayaran pada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, masalah yang akan diteliti adalah “ Bagaimana Prosedur Verifikasi Dokumen Pembayaran Pada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan?”

1.3 Tujuan Magang

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan kegiatan magang ini adalah untuk mengetahui Prosedur Verifikasi Dokumen Pembayaran Pada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Manfaat Magang

- a. Untuk memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa dalam keterampilan praktek.
- b. Menambah pengetahuan dan informasi tentang Prosedur Verifikasi Dokumen Pembayaran Pada BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Sebagai sarana untuk aplikasi ilmu yang telah dipelajari dibangku perkuliahan dengan praktek lapangan.

1.5 Metode Magang

1. Studi Keperpustakaan

Yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan

bacaan yang mencakup yang mencakup buku teks dan bahan-bahan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas penulis.

2. Studi Lapangan

a. Data Primer

Data yang didapat dari wawancara dengan karyawan dan pejabat yang berkepentingan.

b. Data Sekunder

Data berupa laporan mengenai aktivitas yang berhubungan dengan objek yang dibahas.

3. Pencarian Data Melalui Internet

Mencari data melalui internet dapat dilakukan dengan cara mengakses jurnal-jurnal yang membahas topik permasalahan.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Dalam menjalankan kegiatan magang, penulis akan melaksanakan magang pada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan yang berlokasi di jalan H. Agus Salim No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan waktu kegiatan magang akan dilakukan selama 40 hari kerja dimulai 24 Januari sampai 20 maret 2023.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari sub bab yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang dan sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Bab landasan teori ini membahas mengenai pengertian prosedur,

Bab III : GAMBARAN UMUM DINAS/INSTANSI

Bab gambaran umum berisi tentang profil instansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang meliputi sejarah, visi misi, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi organisasi.

Bab IV : PEMBAHASAN

Bab pembahasan merupakan uraian mengenai hasil kegiatan magang selama 40 hari kerja tentang "Prosedur Verifikasi Dokumen Pembayaran Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pesisir Selatan".

Bab V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini dijelaskan kesimpulan yang diperoleh dari analisis serta pembahasan masalah dan saran yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan guna perbaikan dan perubahan untuk masa yang akan datang.

